

# 2025

Minggu ke-3 November  
(17 s.d. 23 November 2025)

# Isu Sepekan

Bidang Polhukam, Komisi I



**BADAN KEAHLIAN**  
**DPR RI**

Bridging research to parliament  
Evidence based policy making

## RENCANA PENGIRIMAN PASUKAN TNI UNTUK MISI PERDAMAIAAN DI GAZA

**Aulia Fitri**

Analis Legislatif Ahli Muda  
[aulia.fitri@dpr.go.id](mailto:aulia.fitri@dpr.go.id)

### Isu dan Permasalahan

Pemerintah Indonesia menyatakan kesiapan untuk mengirim pasukan penjaga perdamaian ke Gaza setelah Dewan Keamanan PBB menyetujui rancangan pembentukan *Board of Peace* (BoP) dan pengerahan *International Stabilization Force* (ISF) melalui resolusi Dewan Keamanan PBB pada 17 November 2025. Rancangan itu disusun melalui diplomasi di antara Amerika Serikat, Qatar, Mesir, Arab Saudi, Persatuan Emirat Arab, Turki, Pakistan, dan Indonesia.

Resolusi tersebut menetapkan pasukan stabilisasi yang akan mengamankan area perbatasan bersama polisi Palestina yang telah dilatih dan diverifikasi. Mereka juga akan bekerja sama dengan negara lain untuk memastikan pasokan bantuan kemanusiaan masuk ke Gaza. Pasukan ini ditugaskan menjalankan proses demiliterisasi Jalur Gaza dan pelucutan permanen senjata kelompok bersenjata non-negara, serta diberi kewenangan menggunakan segala tindakan yang diperlukan. Resolusi tersebut juga membentuk BoP, sebuah badan internasional untuk mengawasi tata kelola, rekonstruksi, dan keamanan Gaza.

Dalam rilis resmi Kementerian Luar Negeri pada 18 November 2025, Pemerintah Indonesia menyambut baik resolusi tersebut yang bertujuan menjaga keberlangsungan gencatan senjata dan memastikan penyaluran bantuan kemanusiaan di Gaza. Menurut Pemerintah, resolusi turut mengedepankan penyelesaian konflik dan perdamaian berkelanjutan melalui penguatan kapasitas Otoritas Palestina, bantuan rekonstruksi, dan penjagaan perdamaian oleh pasukan stabilisasi internasional atas mandat PBB. Selain itu, Indonesia menekankan bahwa mandat pasukan penjaga perdamaian itu untuk mewujudkan solusi dua negara (*two-state solution*) sesuai dengan hukum dan parameter internasional yang telah disepakati.

Menteri Pertahanan RI, Sjafrie Sjamsoeddin, mengungkapkan bahwa Pemerintah tengah mempersiapkan pengerahan 20.000 personel, mayoritas dari unsur kesehatan dan konstruksi (Korps ZENI), untuk membantu stabilitasi Gaza pascagencatan senjata. Indonesia selalu menempatkan isu Palestina sebagai agenda politik luar negeri yang berkomitmen membawa misi moral dan kepentingan nasional yang menegaskan bahwa penjajahan harus dihapuskan. Dalam menjalankan kepentingan tersebut, politik luar negeri Indonesia terus mengambil langkah konsisten dengan aktif dalam Dewan Keamanan PBB, menolak pembukaan hubungan diplomatik dengan Israel, hingga terus memberikan dukungan aktif terhadap solusi dua negara melalui berbagai forum internasional.

Saat ini komitmen tersebut diterjemahkan ke dalam langkah konkret melalui partisipasi aktif sebagai bagian dari pasukan stabilisasi pasca-perang. Rencana pengiriman pasukan TNI untuk misi perdamaian ini merupakan wujud nyata dari Operasi Militer Selain Perang (OMSP) dalam hal menjalankan tugas perdamaian dunia yang sejalan dengan politik luar negeri. Rencana pengiriman pasukan yang berfokus pada tim kesehatan dan konstruksi memperlihatkan bahwa prioritas pemerintah adalah untuk membangun kembali infrastruktur kemanusiaan di Gaza,

bukan menjadi pihak militer aktif di lapangan. Pengerahan pasukan militer dalam misi perdamaian juga merupakan perwujudan konsep "soft peacekeeping" yang berfokus pada pemulihan untuk memantau dan mengawasi proses perdamaian.

Bagi Indonesia, keterlibatan dalam misi perdamaian merupakan penegasan posisi Indonesia sebagai negara yang berperan aktif dalam menjaga stabilitas global, juga sebagai langkah konkret dari komitmen Indonesia mendukung solusi dua negara. Kontribusi Indonesia juga menambah nilai strategis dalam politik luar negeri Indonesia. Dengan terlibat langsung dalam upaya perdamaian Palestina, Indonesia turut memperkuat dukungan global terhadap solusi dua negara yang menjadi langkah konsisten kebijakan luar negeri Indonesia, selain menyuarakan kemerdekaan bagi Palestina. Langkah ini juga memberikan sinyal bahwa Indonesia tidak berhenti hanya pada retorika, tetapi siap mengambil tindakan konkret di bawah kerangka hukum internasional.

## Atensi DPR

Komitmen Indonesia dalam upaya mewujudkan perdamaian di Palestina merupakan bagian dari amanat konstitusi Indonesia (UUD 1945) yang menekankan penghapusan penjajahan di dunia. Lebih lanjut, rencana pengiriman pasukan TNI untuk misi perdamaian di bawah mandat Dewan Keamanan PBB dapat dilihat sebagai langkah konkret dari komitmen Indonesia mendukung solusi dua negara untuk perdamaian di Palestina. Melalui fungsi pengawasan, Komisi I DPR RI dapat mengimbau Pemerintah, khususnya Kementerian Luar Negeri dan Kementerian Pertahanan agar misi perdamaian ini tetap dapat menempatkan konsistensi netralitas Indonesia dalam koridor politik luar negeri bebas aktif di tengah arena politik Timur Tengah yang berlapis kepentingan. Secara khusus, Komisi I DPR RI dapat mengimbau Kementerian Pertahanan untuk menjalankan OMSP TNI dalam misi perdamaian dunia sesuai dengan prinsip konstitusi.

## Sumber

antaranews.com, 20 November 2025;  
cnnindonesia.com, 19 November 2025;  
kompas.com, 21 November 2025;  
republika.co, 22 November 2025; dan  
tempo.co, 18 November 2025.



Koordinator Sali Susiana  
Polhukam Puteri Hikmawati  
EKKUINBANG Sony Hendra P.  
Kesra Hartini Retnaningsih



<https://pusaka.dpr.go.id>



@pusaka\_bkdprri

EDITOR

LAYOUTER

Polhukam

Ahmad Budiman  
Prayudi  
Rachmi Suprihartanti S.  
Novianti

Devindra R. Oktaviano  
Ully Ngesti Pratiwi  
Desty Bulandari  
Yustina Sari

EKKUINBANG

Sri Nurhayati Q.  
Rafika Sari  
Ari Mulianta Ginting  
Eka Budiyanti  
Edmira Rivani  
Hilma Meilani

Firyal Nabihah  
Ulayya Sarfina  
Yosua Pardamean S.  
Jeffrey Ivan Vincent  
Fauzan Lazuardi R.  
Anugrah Juwita Sari

Kesra

Trias Palupi K.  
Luthvi Febryka Nola  
Yulia Indahri

Timothy Joseph S. G.  
Nur Sholikah P. S.  
Fieka Nurul Arifa

©PusakaBK2025



Bridging Research to Parliament  
Evidence Based Policy Making